



2024

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jalan Rohana Kudus – Painan
Email: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi dan pengendalian terhadap hasil RKPD untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dilakukan terhadap 6 Program dimana 1 (satu) Program Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota dan 5 (Lima) Program Prioritas yang dilaksanakan oleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melalui 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/ kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan daerah kita, terimakasih.

Billahhi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 5 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan,


MUEYANDRI, S.T., M.M.
NIP. 19760308 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	8
1. Prog. Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota	8
2. Prog. Ideologi Pancasila & Karakter Kabangsaan	8
3. Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	9
4. Prog. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9
5. Prog. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	9
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Konflik Sosial	10
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	13
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024	13
3.2 Rekomendasi.....	14
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal (1) perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan

dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD yang tersebar dalam Renja-PD dan sehingga keselarasan antara APBD pelaksanaannya dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan untuk perencanaan selanjutnya.

Evaluasi RKPD Tahun 2024 ini, didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2024, dalam mengevaluasi fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun

2024.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klafikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Evaluasi terhadap Hasil RKPD Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024, dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/ kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2024;
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/ kegiatan dan sub kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2024 dan RPJMD tahun 2021- 2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2024.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2024.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2024.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

- g. Merumuskan rekomendasi dan sasaran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- h. Menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- i. Menjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan perencanaan Nasional serta dengan rencana tata ruang Daerah dan Nasional.
- j. Menjamin terciptanya konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
- k. Menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja-PD dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program/ kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber rujukan: Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan melalui 13 Kegiatan dengan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, dengan anggaran sebesar Rp.3.555.282.273,- realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp.1.695.978.850,- atau 47,70% (sangat rendah). Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tingkat capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2024 pada triwulan II adalah sebesar 53% (rendah) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 35% (sangat rendah).

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. Program ini dapat terlaksana dengan total anggaran sebesar Rp.625.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.115.540.090,- atau 18,49% (sangat rendah). Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tingkat capaian kinerja pada Renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 804% (sangat tinggi) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 55% (rendah). Pelaksanaan kegiatan ideologi ini selain dari pelaksanaan upacara hari besar nasional juga pelaksanaan kegiatan Hari Bela Negara dan Pembentukan Paskibraka. Upacara hari besar nasional yang terlaksana pada Triwulan II ini adalah sebanyak 5 upacara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Upacara Hari Otonomi Daerah;
- b. Upacara Hari Pendidikan Nasional;
- c. Upacara Hari Kebangkitan Nasional;
- d. Upacara Hari Lahir Pancasila;
- e. Upacara Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia.

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk tahun 2024 tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Sedangkan capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2024 adalah 23% (sangat rendah) dan capaian anggaran sebesar 4% (sangat rendah).

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tidak adanya anggaran untuk tahun 2024 karena keterbatasan anggaran yang ada. Sedangkan untuk capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2024 adalah 78% (tinggi) dan capaian anggarannya sebesar 6% (sangat rendah). Penambahan pencatatan Ormas triwulan II ada sebanyak 2 (dua) Ormas, sehingga jumlah Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebanyak 65 Ormas.

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk tahun 2024 total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.50.742.615.936,-. Untuk realisasi anggaran sampai triwulan II sebesar Rp. 18.544.121.332,- atau 36,55% (sangat rendah). Capaian kinerja Renstra sampai tahun 2024 sebesar 65% (rendah) dengan capaian realisasi anggaran 138% (sangat tinggi). Tahun 2024 ini pelaksanaan Program ini berupa hibah keuangan kepada Partai Politik, hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu, Hibah TNI dan POLRI Kabupaten Pesisir Selatan. Hibah KPU dan Bawaslu telah dilaksanakan 100% pada triwulan II tahun 2024. Pemberian hibah kepada 13 Partai Politik sudah diberikan kepada 4 partai politik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.281.616.098,- atau 27,17% (sangat rendah) pencairan selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

Untuk Hibah TNI dan POLRI akan direncanakan pencairan dana hibahnya akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Total anggaran setelah sebesar Rp.82.000.500,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp.2.800.000,- atau 3,41% (sangat rendah). Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh honorarium Forkopimda belum bisa dibayarkan karena menunggu usulan besaran honorarium yang telah ditetapkan, atas saran BPK pembayaran honorarium Forkopimda dibayarkan di perubahan anggaran.

Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial tingkat capaian kinerja pada Renstra sebesar 67% (sedang) dengan capaian realisasi anggaran 31% (sangat rendah). Dalam pelaksanaan sub kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain pembayaran honorarium Forkopimda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memfasilitasi potensi konflik yang terjadi selama tahun 2024, untuk triwulan II konflik yang terfasilitasi adalah sebanyak 5 Konflik.

Untuk sub kegiatan yang memfasilitasi konflik dan pengawasan Orang asing terletak pada 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub kegiatan ini indikatornya adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan ini pada triwulan II adalah 50 orang. 50 orang di sini merupakan yang mengikuti Rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA yang termasuk di dalamnya adalah seluruh Camat yang ada di Pesisir Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Imigrasi I TPI Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub

kegiatan ini indikatornya adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Capain kinerja triwulan II dari sub kegiatan monitoring evaluasi adalah 1 Laporan.

BAB III**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI****3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023.**

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

**Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Triwulan II Tahun 2024**

No	Program	Anggaran APBD 2024	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	(%)	Kategori	(%)	Kategori
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.555.282.273	1.695.978.850	53	SR	47,70	SR
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	625.000.000	115.540.090	804	ST	18,49	SR
3.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	23	SR	0	SR
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	78	T	6	SR
5.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.742.615.936	18.262.505.234	65	R	36,55	SR
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	82.000.500	2.800.000	67	S	3,41	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja				182			

Mempedomani hasil evaluasi sampai dengan triwulan II ini didapat rata rata capaian kinerja sebesar 182% (ST) dengan realisasi keuangan sebesar 47,7% (SR). Capaian kinerja melebihi target dikarenakan tingginya capaian kinerja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja OPD dapat cepat diketahui.
- b. Kepala OPD hendaknya lebih menata strategi dalam pengendalian pelaksanaan/ pemantauan dan evaluasi pada Organisasi Perangkat kerjanya.
- c. Setiap PPTK perlu upaya ekstra agar capaian kinerja program dan kegiatan dapat tercapai lebih cepat sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan daerah/ perangkat daerah.
- d. Dalam pengisian tabel pada Laporan RKPD selalu berkoordinasi dengan Bapedalitbang.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Priode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab		
														I		II		III		IV										
								(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)	
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
			8				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				64.292.051.743		17.223.997.656		44.838.895.103		19.075.110.957								20.358.440.272		37.582.437.928		58%	
			8	01			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				64.292.051.743		17.223.997.656		44.838.895.103		19.075.110.957								20.358.440.272		37.582.437.928		58%	
1.	Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah		8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	33.425.903.863	40,00%	9.989.346.080	100%	3.553.717.221	25,00%	785.595.223	25,00%	910.383.627						50,00%	1.695.978.850	53%	11.685.324.930	53%	35%	
			8	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	160.596.788	40,00%	3.501.141.577	100%	43.375.850	25,00%	5.198.800	25,00%	4.141.750						50,00%	9.340.550	53%	3.510.482.127	53%	2186%	
			8	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	160.596.788	8 Dokum en	3.501.141.577	4 Dokumen	43.375.850	1 Dokumen	5.198.800	1 Dokumen	4.141.750					2 Dokumen	9.340.550	10 Dokumen	3.510.482.127	50%	2186%	
			8	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11.055.368.197	56,10%	4.709.994.658	100%	2.460.246.181	25,00%	489.623.604	25,00%	800.507.198						50,00%	1.290.130.802	68,60%	6.000.125.460	68,60%	54%	
			8	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	10.295.636.654	22 Orang/ Bulan	4.507.691.150	22 Orang/Bulan	2.345.766.181	22 Orang/ Bulan	469.083.604	22 Orang/ Bulan	769.697.198					22 Orang/Bulan	1.238.780.802	22 Orang/Bulan	5.746.471.952	100%	56%	
			8	01	01	2,01	0002	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	759.731.543	24 Dokum en	202.303.508	12 Dokumen	114.480.000	3 Dokumen	20.540.000	3 Dokumen	30.810.000					6 Dokumen	51.350.000	30 Dokumen	253.653.508	50%	33%	
			8	01	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.000.000	-	0	100%	3.000.000	-	0	35,67%	1.070.000						35,67%	1.070.000	35,67%	1.070.000	35,67%	36%	
			8	01	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	-	0	1 Dokumen	3.000.000	-	0	1 Dokumen	1.070.000					1 Dokumen	1.070.000	1 Dokumen	1.070.000	100%	36%	
			8	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	12.149.743.850	56,67%	14.000.100	85%	7.700.000	-	0	-	-	-					-	-	57%	14.000.100	67%	0,12%	
			8	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	360.762.500	8 Orang	14.000.100	3 Orang	7.700.000	-	0	-	-					-	-	8 Orang	14.000.100	67%	4%	
			8	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	2.931.885.935	52,58%	718.360.992	100%	416.609.383	26,00%	108.331.733	9,96%	41.503.460						35,96%	149.835.193	61,57%	868.196.185	72%	30%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab												
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 X 100 %											
								(1)	(2)	(3)				(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)								
		8	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	55.300.390	20 Paket	39.568.782	8 Paket	6.228.321	4 Paket	2.565.000	-	-					4 Paket	2.565.000	24 Paket	42.133.782	92%	76%				
		8	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah P yang Disediakan aket Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	64.237.056	1 Paket	13.626.130	-	-	-	-	-	-					-	-	1 Paket	13.626.130	20%	21%				
		8	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	125.391.080	12 Paket	60.865.203	7 Paket	27.013.987	2 Paket	5.736.000	-	-					2 Paket	5.736.000	14 Paket	66.601.203	58%	53%				
		8	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	168.992.252	12 Paket	33.101.500	7 Paket	41.388.075	3 Paket	10.444.000	1 Paket	2.180.000					4 Paket	12.624.000	16 Paket	45.725.500	67%	27%				
		8	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	58.350.167	6 Dokum en	4.970.000	1 Dokumen	0	-	0	-	-					-	0	6 Dokumen	4.970.000	100%	9%				
		8	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	104.050.659	3 Lapora n	20.576.500	1 Laporan	10.780.000	-	924.000	-	-					-	924.000	3 Laporan	21.500.500	50%	21%				
		8	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1.019.425.581	6 Lapora n	545.652.877	4 Laporan	331.199.000	1 Laporan	88.662.733	1 Laporan	39.323.460					2 Laporan	127.986.193	8 Laporan	673.639.070	133%	66%				
		8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	85%	4.466.903.246	67,02%	241.439.000	100%	257.168.078	66,19%	110.356.500	0%	-					66,19%	110.356.500	83,57%	351.795.500	98%	8%				
		8	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	44 Unit	559.316.250	45 Unit	92.018.000	43 Unit	99.907.500	2 Unit	19.550.000	-	-					2 Unit	19.550.000	47 Unit	111.568.000	107%	20%				
		8	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	245.980.746	37 Unit	149.421.000	18 Unit	157.260.578	11 Unit	90.806.500	-	-					11 Unit	90.806.500	48 Unit	240.227.500	80%	98%				
		8	01	01	2,08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	1.209.914.437	50%	370.468.189	100%	225.627.533	25%	42.793.586	25%	52.524.719					50%	95.318.305	62,50%	465.786.494	63%	38%				
		8	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	152.141.366	3 Lapora n	40.277.557	1 Laporan	32.438.400	-	7.650.511	-	5.274.719					-	12.925.230	3 Laporan	53.202.787	50%	35%				
		8	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	808.337.164	3 Lapora n	330.190.632	5 Laporan	193.189.133	1 Laporan	35.143.075	1 Laporan	47.250.000					2 Laporan	82.393.075	5 Laporan	412.583.707	83%	51%				
		8	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	1.448.491.410	43,00%	433.941.564	100%	139.990.196	20,92%	29.291.000	7,60%	10.636.500					28,52%	39.927.500	50,13%	473.869.064	59%	33%				

No	Sasaran	Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab		
															I		II		III		IV										
		(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13			15 = 14/6 X 100 %	
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	533.463.772	7 Unit	125.889.064	1 Unit	36.900.000	1 Unit	10.967.500	4 Unit	5.919.000					5 Unit	16.886.500	12 Unit	142.775.564	171%	27%			
		8	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.854.375	7 Unit	26.282.500	5 Unit	29.740.196	2 Unit	13.740.500	1 Unit	3.467.500					3 Unit	17.208.000	10 Unit	43.490.500	50%	29%			
		8	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	17.523.413	31 Unit	9.570.000	21 Unit	11.350.000	1 Unit	615.000	2 Unit	1.250.000					3 Unit	1.865.000	34 Unit	11.435.000	57%	65%			
		8	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	398.450.540	2 Unit	272.200.000	3 Unit	62.000.000	1 Unit	3.968.000	-	-					1 Unit	3.968.000	3 Unit	276.168.000	50%	69%			
2.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	500 Orang	2.471.383.966	1589 Orang	1.240.415.840	500 Orang	820.000.000	78 Orang	25.150.500	2352 Orang	90.389.590					2430 Orang	115.540.090	4019 Orang	1.355.955.930	804%	55%			
		8	01	02	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	105 Upacara	2.471.383.966	34 Upacara	1.240.415.840	21 Kali	820.000.000	1 Upacara	25.150.500	5 Upacara	90.389.590					6 Upacara	115.540.090	40 Upacara	1.355.955.930	38%	55%			
		8	01	02	2,01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3000 Orang	1.249.811.466	1589 Orang	284.593.340	500 Orang	70.000.000	78 Orang	19.075.500	2352 Orang	31.320.800					2430 Orang	50.396.300	4019 Orang	334.989.640	134%	27%			
		8	01	02	2,01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	219 Orang	2.250.000.000	-	-	73 Orang	750.000.000	-	6.075.000	-	59.068.790					-	65.143.790	-	65.143.790	-	2,90%			
3.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik di Kalangan Masyarakat/ Aparatur Daerah Serta Terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	16.607.618.556	43%	4.300.705.493	85%	40.030.000.030	25%	18.262.505.234	25%	281.616.098					50%	18.544.121.332	55%	22.844.826.825	65%	138%			

No	Sasaran	Kode Rekening				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab			
														I		II		III		IV										
								(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
			8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	12 Dokumen	16.607.618.556	6 Dokum en	4.300.705.493	2 Dokumen	40.030.000.030	-	18.262.505.234	1 Dokumen	281.616.098					1 Dokumen	18.544.121.332	7 Dokumen	22.844.826.825	58%	138%		
			8	01	03	2.01	0004Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	156 Orang	6.927.135.417	78 Orang	3.877.359.843	26 Orang	40.000.000.152	-	18.262.505.234	-	281.616.098					-	18.544.121.332	78 Orang	22.421.481.175	50%	324%		
			8	01	03	2.01	0005Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	860.233.139	6 Lapora n	423.345.650	2 Laporan	29.999.878	-	-	1 Laporan	-					1 Laporan	-	7 Laporan	423.345.650	58%	49%		
4.	Sasaran 3: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Orams yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi	83 Ormas	1.341.523.672	63 ormas	77.868.350	73 Ormas	69.999.754	-	-	2 Ormas	-					2 Ormas	-	65 Ormas	77.868.350	78%	6%		
			8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	83 Ormas	1.341.523.672	63 ormas	77.868.350	73 Ormas	69.999.754	-	-	2 Ormas	-					2 Ormas	-	65 Ormas	77.868.350	78%	6%		

No	Sasaran	Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab		
		(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13			15 = 14/6 X 100 %	
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
			8	01	04	2.01	0006	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	790.859.297	6 Lapora n	77.868.350	2 Laporan	69.999.754	-	-	1 Laporan	-			1 Laporan	-	7 Laporan	77.868.350	58%	10%				
5.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	5.969.188.486	20%	210.605.316	85%	69.999.998	-	-	-	-			-	-	20%	210.605.316	23%	4%				
			8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	30 Kali	5.969.188.486	7 Kali	210.605.316	1 Kali	69.999.998	-	-	-	-			-	-	7 Kali	210.605.316	23%	4%				
			8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320 Orang	1.723.624.707	570 Orang	133.069.140	64 Orang	41.999.929	-	-	-	-			-	-	570 Orang	133.069.140	178%	8%				
			8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	480.609.879	6 Lapora n	77.536.176	2 Laporan	28.000.069	-	-	-	-			-	-	6 Laporan	77.536.176	50%	16%				
6.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang ditangani	100%	4.476.433.200	54%	1.405.056.577	100%	295.178.100	25%	1.860.000	25%	940.000			50%	2.800.000	67%	1.407.856.577	67%	31%				

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2021 - 2026	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penang gung Jawab								
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 X 100 %							
								(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)				(7)			(8)		(9)		(10)		(11)	
		8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	50 Konflik	4.476.433.200	27 Konflik	1.405.056.577	10 Konflik	295.178.100	-	1.860.000	5 Konflik	940.000					5 Konflik	2.800.000	32 Konflik	1.407.856.577	64%	31%	
		8	01	06	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	360 Orang	2.684.660.161	847 Orang	1.205.253.020	60 Orang	50.089.172	-	-	50 Orang	-					50 Orang	-	897 Orang	1.205.253.020	249%	45%	
		8	01	06	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	326.023.039	6 Laporan	102.964.207	2 Laporan	50.089.172	-	-	1 Laporan	-					1 Laporan	-	7 Laporan	102.964.207	58%	32%	
		8	01	06	2.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	133.250.000	2 Dokumen	96.839.350	2 Dokumen	194.999.756	-	1.860.000	1 Dokumen	940.000					1 Dokumen	2.800.000	3 Dokumen	99.639.350	25%	75%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																182%		45%										
PERINGKAT KINERJA																ST		SR										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:						:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:						:																						

Painan, 5 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



MULYANDRI, S.T., M.M.
NIP. 19760308 200701 1 002